



Jurnal

MANAJEMEN PENDIDIKAN

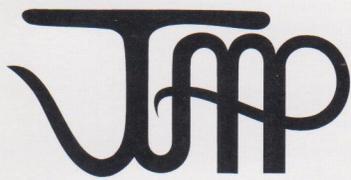
Jurnal Ilmiah Administrasi, Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan

- **Sebuah Refleksi Kebebasan Akademik dalam Masyarakat Ilmiah Perguruan Tinggi**
Oleh: *Mada Sutapa*
- **Membangun *Competitive Advantage* Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Tantangan dan Perubahan Abad 21**
Oleh: *Elin Rosalin*
- **Mengkreasi Pendidikan Multikultural di Sekolah dengan Menerapkan Manajemen Mutu Sekolah Secara Total**
Oleh: *Setya Raharja*
- **Peran Humas sebagai Upaya Menjalinkan Kerja Sama antara SMK dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUD/I)**
Oleh: *Pandit Isbianti*
- **Strategi Mengembangkan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah**
Oleh: *Nurtanio Agus P.*
- **Kepemimpinan Perempuan Bernilai Kesundaan di Bidang Pendidikan**
Oleh: *Priadi Surya*
- **Mengembangkan Profesionalitas Guru Abad 21 Melalui Program Pembimbingan yang Efektif**
Oleh: *Dwi Esti Andriani*
- **Tantangan Kemitraan Orangtua, Sekolah, dan Masyarakat**
Oleh: *Rahmania Utari*

Diterbitkan Oleh:

Jurusan Administrasi Pendidikan

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dan
Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI)



Jurnal MANAJEMEN PENDIDIKAN

Jurnal Ilmiah Administrasi, Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan

Nomor 02/Th.VI/Oktober/2010

Pelindung : Muh. Farozin
Penanggungjawab : Tatang M. Amirin
Pemimpin Redaksi : Suyud
Sekretaris Redaksi : Mada Sutapa
Rahmania Utari

Anggota Redaksi:
Moeljani A. Nurhadi
Suharsimi Arikunto
Sudiyono
Setya Raharja

Penyunting Ahli:
Hendyat Sutopo (UM)
Suminto A. Sayuti (UNY)

Tata Letak:
Nurtanio Agus P.

Diterbitkan oleh:
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FIP UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
bekerjasama dengan
IKATAN SARJANA MANAJEMEN PENDIDIKAN INDONESIA (ISM&PI)

Alamat Redaksi:
Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY
Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Tlp. 0274-550842, Fax. 0274-540611
e-mail: apfipuny@yahoo.com

Redaksi menerima tulisan berisi kajian pendidikan. Tulisan belum pernah dipublikasikan, diketik spasi ganda, dengan jumlah kurang lebih 15 halaman kwarto. Sistematika dimulai dengan pendahuluan, pembahasan, penutup, dan diakhiri daftar pustaka. Tulisan dilengkapi dengan biodata penulis secukupnya.

DAFTAR ISI

Sebuah Refleksi Kebebasan Akademik dalam Masyarakat Ilmiah Perguruan Tinggi <i>Oleh: Mada Sutapa</i>	1-8
Membangun <i>Competitive Advantage</i> Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Tantangan dan Perubahan Abad 21 <i>Oleh: Elin Rosalin</i>	9-26
Mengkreasi Pendidikan Multikultural di Sekolah dengan Menerapkan Manajemen Mutu Sekolah Secara Total <i>Oleh: Setya Raharja</i>	27-40
Peran Humas Sebagai Upaya Menjalinkan Kerja Sama antara SMK dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) <i>Oleh: Pandit Isbianti</i>	41-54
Strategi Mengembangkan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah <i>Oleh: Nurtanio Agus P.</i>	55-63
Kepemimpinan Perempuan Bernilai Kesundaan di Bidang Pendidikan <i>Oleh: Priadi Surya</i>	64-77
Mengembangkan Profesionalitas Guru Abad 21 Melalui Program Pembimbingan yang Efektif <i>Oleh: Dwi Esti Andriani</i>	78-92
Tantangan Kemitraan Orangtua, Sekolah, dan Masyarakat <i>Oleh: Rahmania Utari</i>	93-107

PERAN HUMAS SEBAGAI UPAYA MENJALIN KERJA SAMA ANTARA SMK DENGAN DUNIA USAHA/DUNIA INDUSTRI (DU/DI)

Pandit Isbianti *)

Abstract

Dual system education is a program applied in vocational school. Dual system education is an educational system by which integrates learning at school and practicing work. Therefore, dual system education always involves working world or industry as colleagues of vocational school. One way to obtain the member of vocational schools colleague is through a public relation activity.

Good public relations are those who are guided by some principals which consist of integrity, continuity, coverage, simplicity, constructiveness and adaptability. The procedure of public relation consist of three steps : analyzing public, holding communication with public, and involving the public into the activity.

Public relation in a dual system education could bring good long term impacts toward vocational school. The achievement of public relation, generally, can be seen by the number of public supports and beliefs toward vocational school. The more supports and beliefs to vocational school gained, the more industry would be joined with vocational school as a colleague. In addition, the more teamwork possessed, the wider vocational school net work achieved. The incurring of public supports and beliefs also show the good relation among vocational schools and industries. This would be then made up better relationship leading to the better contribution to achieve the vocational schools' goals.

Keywords: Dual system education, vocational school, DUDI

A. Pendahuluan

Pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

*) Dosen pada Jurusan Administrasi Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta

Salah satu bagian dari Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan kejuruan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu pendidikan kejuruan mengutamakan pengembangan kemampuan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu, kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja, melihat peluang kerja dan mengembangkan diri di kemudian hari. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut tentu siswa SMK harus memiliki kemampuan baik itu teori maupun praktik.

Kemampuan siswa dapat tercapai apabila dipupuk dan dikembangkan terus-menerus. Oleh karena itu, sekolah yang berfungsi sebagai wadah yang bertugas untuk memupuk dan mengembangkan kemampuan tersebut harus proaktif melaksanakan program yang tepat agar dapat memfasilitasi siswa menuju tujuan yang diharapkan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan tersebut adalah adanya program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang sudah lama dicanangkan oleh pemerintah.

B. Pengertian Pendidikan Sistem Ganda (PSG)

Konsep PSG seperti tertera dalam kurikulum SMK N 2 Godean Kabupaten Sleman adalah pola penyelenggaraan diklat yang dikelola bersama-sama antara SMK dengan industri atau asosiasi profesi sebagai institusi pasangan (IP), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi dan sertifikasi yang merupakan satu kesatuan program dengan menggunakan berbagai bentuk alternatif pelaksanaan seperti day release, block release, dan sebagainya. Hal senada dikemukakan oleh Wardiman Djojonegoro (1994) bahwa PSG adalah suatu penyelenggaraan pendidikan yang mengintegrasikan secara tersistem kegiatan pendidikan (teori) di sekolah dengan kegiatan pendidikan (praktek) di industri.

Penerapan sistem ganda diawali dari adanya gagasan Mendikbud pada tahun 1993 setelah belajar dari kenyataan, pengalaman empiris dan komparasi terhadap penyelenggaraan pendidikan di negara-negara maju. Sebagai sosok teknolog, Mendikbud berusaha untuk melaksanakan kebijakan *link and match* yang telah ditetapkannya. Implikasi adanya gagasan ini dimulai pada tahun ajaran 1994/1995 pada sejumlah besar SMK.

Ditdikmenjur (1994:5) menggariskan ada 4 tujuan diselenggarakannya PSG yaitu ; (1) menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional yakni tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja, (2) memperkokoh *link and match* antara SMK dengan dunia kerja, (3) meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas profesional dan (4) memberi pengakuan dan penghargaan pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

C. Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI)

Konsep PSG menjelaskan bahwa PSG dilaksanakan tidak hanya di Sekolah tetapi juga di DU/DI. Hal ini menyuratkan bahwa PSG membutuhkan DU/DI sebagai partner SMK dalam penyelenggaraan PSG. Sebagai partner SMK, DU/DI memiliki peran penting dalam program PSG. Oleh karena itu, keberadaan DU/DI dapat dikatakan wajib dalam penyelenggaraan SMK.

Peran DU/DI dalam pelaksanaan PSG oleh Slamet PH (1994:5) dijelaskan sebagai berikut :

1. Sebagai aktivis

Sebagai aktivis, industri dituntut secara aktif memperbaiki pendidikan kejuruan melalui perannya sebagai tutor, *role model*, penyumbang peralatan (fasilitator) dan sebagainya. Industri sudah merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional (SPN) sehingga industri dapat diberi wewenang untuk mewarnai isi dan proses pendidikan kejuruan. Industri dapat memberikan inspirasi kepada Kepala Sekolah untuk mengadakan improvisasi dalam kegiatan belajar mengajar agar selaras dengan perkembangan yang tersedia di Dunia kerja.

2. Sebagai edukator

Sebagai edukator DU/DI dituntut untuk memberikan pendidikan sebagai pelajaran jangka panjang. Tidak semua pelajaran dapat diberikan di sekolah. Sebagian pelajaran yang melengkapai kemampuan profesional peserta didik SMK diperoleh di DU/DI. Contoh pelajaran yang banyak diberikan melalui DU/DI selain ketrampilan adalah peningkatkan etos kerja dan disiplin siswa.

D. Upaya Menjalin Kerjasama Dengan DU/DI

Berjalannya program pendidikan kejuruan sangat tergantung pada komitmen dari kedua belah pihak yaitu sekolah dan DU/DI dalam menjalankan kerjasama. Kerjasama yang baik dapat menimbulkan hasil yang baik pula yang dalam hal ini adalah tercapainya tujuan SMK melalui program PSG.

Terwujudnya suatu kerjasama tentu saja tidak serta merta terjalin tanpa adanya suatu langkah permulaan. Langkah awal sebelum memulai suatu kerjasama menurut Slamet PH (1994:6) suatu SMK sebaiknya melakukan hal-hal berikut ini :

1. Mensosialisasikan konsep PSG kepada semua pihak yang terkait agar mereka benar-benar memahami konsep PSG,
2. Menciptakan dan meningkatkan komunikasi antara SMK dengan DU/DI
3. Menciptakan dan melaksanakan mekanisme perencanaan dan pengambilan keputusan secara bersama,

4. Mendiskusikan cara-cara melaksanakan PSG dengan pihak DU/DI dan pihak terkait lainnya,
5. Mengusahakan adanya jaminan komitmen dari SMK dan DU/DI
6. Merumuskan keuntungan-keuntungan bagi pihak yang terlibat dalam sistem ganda
7. Secara bersama-sama membuat aturan main dalam pelaksanaan PSG.

Untuk bisa mewujudkan program PSG dari proses perintisan kerjasama hingga ditandatanganinya kontrak kerjasama tentu saja tidak terlepas dari adanya peran humas (hubungan masyarakat). Masyarakat di sini diartikan sebagai pihak-pihak di luar sekolah yang terkait dengan pendidikan di SMK.

E. Pelaksanaan Humas dalam Menjalin Kerjasama antara SMK dengan DU/DI

Hubungan masyarakat merupakan unsur yang penting dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, humas merupakan “indera” bagi suatu organisasi. Humas tidak hanya diperlukan di dalam organisasi komersial tetapi organisasi yang sifatnya sosial seperti pendidikan juga memerlukan kegiatan humas dalam menjaga keeksistensinya. Marbun (2003:96) mengemukakan bahwa humas adalah seni menyajikan pandangan dan kepentingan organisasi dengan sebaik dan sejuelas mungkin kepada pihak-pihak yang sangat berkepentingan terhadap perusahaan, seperti para penanam modal, pelanggan, pegawai, pembuat peraturan (legislator), pengamat lingkungan dan sebagainya.

Bertolak dari pengertian di atas, perusahaan dapat diartikan sebagai SMK karena dalam konteks ini adalah sekolah kejuruan. Sedangkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam konteks ini adalah masyarakat pada umumnya, DU/DI, KADINDA, Dinas pendidikan, dan organisasi lain yang memiliki hubungan dengan program pendidikan di SMK.

International Public Relation Association (IPRA) yakni persatuan para ahli dan praktisi public relations (humas) dalam Assumpta (2001) memberikan definisi kerja public relations (humas) adalah fungsi manajemen yang khas yang mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya mengenai komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama, melibatkan penerangan dan tanggapan dalam hubungan dengan opini publik, menetapkan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan umum, menopang manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan yang dini dalam membantu kecenderungan dan menggunakan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama.

Definisi di atas menjelaskan secara umum bahwa humas dapat diartikan sebagai fungsi manajemen yang khas antar organisasi dengan publiknya, atau dalam konteks ini adalah SMK

dengan publik intern yaitu guru, karyawan dan siswa serta publik eksternnya yaitu DU/DI dan organisasi lain yang sejenis dan berkeentingan terhadap pendidikan di SMK.

Upaya menjalin hubungan kerjasama antara sekolah dengan DU/DI merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri oleh SMK. Untuk menjalin kerjasama ini pihak sekolah harus berusaha sebaik mungkin agar dapat menarik DU/DI untuk secara sukarela bersedia bekerjasama dengan pihak sekolah dalam pelaksanaan pendidikan di SMK. Dalam menjalankan upaya ini humas sekolah memegang peranan penting untuk turut mendukung terwujudnya suatu hubungan kerjasama yaitu dengan membina komunikasi yang baik serta membina hubungan harmonis kepada publik baik itu intern maupun ekstern. Zulkarnain Nasution (2006:30) mengemukakan bahwa peran humas dalam lembaga pendidikan antara lain :

1. membina hubungan harmonis kepada publik intern dan hubungan kepada publik ekstern,
2. membina komunikasi dua arah kepada publik internal dan publik eksternal dengan menyebarkan pesan, informasi dan publikasi hasil penelitian, dan berbagai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan,
3. mengidentifikasi dan menganalisis suatu opini atau berbagai persoalan baik yang ada di lembaga pendidikan maupun yang ada di masyarakat,
4. berkemampuan mendengar keinginan atau aspirasi-aspirasi yang terdapat di dalam masyarakat, dan
5. bersikap terampil dalam menerjemahkan kebijakan-kebijakan pimpinan dengan baik.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa humas berperan untuk *mencover* pencitraan masyarakat terhadap lembaga agar masyarakat mau memberikan dukungan secara sukarela dengan adanya citra lembaga pendidikan yang baik. Untuk membuat suau pencitraan yang baik tentu saja tidak hanya merupakan tugas dari humas saja, tetapi juga tugas dari seluruh komponen sumberdaya sekolah. Selain membangun kesan positif dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, humas juga harus bisa mengembangkan pemahaman kepada masyarakat tentang maksud-maksud dan sasaran dari sekolah.

Seperti dikemukakan oleh Zulkarnain Nasution (2006:40) bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh kegiatan humas adalah:

1. mengembangkan pemahaman kepada masysrakat tentang maksud-maksud dan sasaaran dari sekolah,
2. memberikan penilaian program kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekolah,
3. menjalin dan meningkatkan hubungan harmonis anatar orang tua siswa dengan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik,

4. membangun kesan positif dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah,
5. menginformasikan kepada masyarakat tentang rencana program dan kegiatan sekolah,
6. mencari bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan peningkatan program sekolah,
7. sekolah sebagai jasa lembaga pendidikan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan (siswa, keluarga, dan masyarakat lain), serta
8. sebagai sarana kreatif dalam mencari dana pendidikan alternatif dalam bentuk kerjasama dengan lembaga lain.

Tujuan humas juga disampaikan oleh L.Hagman dalam Modul Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Humas Sekolah dan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat yang menyebutkan bahwa tujuan humas sebagai berikut :

1. untuk memperoleh bantuan dari orang tua murid/masyarakat. Bantuan ini tidak hanya sekedar uang, tetapi juga material dan sumbangan pemikiran yang dapat membantu memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh sekolah,
2. untuk memajukan program pendidikan. Dengan adanya kegiatan humas, masyarakat dan sekolah dapat saling mengisi, memberikan pendapat dan bekerjasama untuk mewujudkan pendidikan yang maju dan berkualitas,
3. untuk mengembangkan kebersamaan dan kerjasama yang erat, sehingga segala permasalahan dan lain-lain dapat dilakukan secara bersama dan dalam waktu yang tepat.

Berbicara mengenai kegiatan humas, mau tidak mau kita juga harus berbicara tentang informasi. Apabila orang tua siswa dan masyarakat diharapkan akan memberikan dukungan yang berarti kepada program sekolah, tentu penyampaian informasi tentang sekolah (terkait dengan fakta, pikiran, perasaan, kebutuhan dan sasaran) kepada mereka menjadi kewajiban penting dari setiap pimpinan, guru dan karyawan sekolah. Informasi ini bisa bertalian dengan kemajuan dan prestasi siswa, perkembangan baru dalam kurikulum dan metode proses belajar mengajar.

Hal di atas sejalan dengan pemikiran C.L. Brownell yang dikutip oleh Suriansyah (2001) yang mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat tentang program merupakan awal dari munculnya perhatian dan dukungan. Oleh karena itu orang tua / masyarakat yang tidak mendapatkan penjelasan dan informasi dari sekolah tentang apa dan bagaimana mereka dapat membantu sekolah akan cenderung tidak tahu terhadap apa yang harus mereka lakukan/ bagaimana mereka harus melakukan sesuatu untuk membantu sekolah. Hal tersebut sebagai akibat dari ketidak tahuan mereka. Terkait dengan pernyataan di atas, maka muncul pertanyaan “bagaimana DU/DI mau menjalin hubungan kerjasama dengan SMK jika DU/DI tidak mengenal SMK sejauh yang mereka perlukan?” Banyaknya informasi yang diterima oleh DU/DI mengenai SMK yang akan menjadi mitra kerjanya akan sangat berpengaruh terhadap kesediaan DU/DI untuk menjalin hubungan kerjasama dengan SMK.

Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan dalam Modul Pendidikan dan Pelatihan Hubungan Sekolah dan Masyarakat mengungkapkan bahwa aktivitas humas yang baik harus berpedoman pada prinsip-prinsip humas yang terdiri atas :

1. Integrity

Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu, dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan dan disuguhkan kepada masyarakat yang dalam konteks PSG adalah DU/DI harus merupakan informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non akademik. Hindarkan sejauh mungkin upaya menyembunyikan (*hidden activity*) kegiatan yang telah, sedang dan akan dijalankan oleh lembaga pendidikan, untuk menghindari salah persepsi serta kecurigaan terhadap lembaga pendidikan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.

2. Continuity

Hubungan sekolah dengan masyarakat (DU/DI) harus dilakukan secara terus menerus, jangan hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu, misalnya hanya 1 kali dalam satu tahun atau sekali dalam satu semester/caturwulan, atau hanya dilakukan oleh SMK pada saat akan meminta bantuan. Hubungan antara SMK dengan DU/DI harus dilakukan secara periodik dan sesering mungkin. Humas harus lebih sering dilakukan dengan DU/DI yang sudah memiliki ikatan kerjasama. Humas ini dilakukan dalam bentuk koordinasi kegiatan PSG. Koordinasi ini membawa manfaat bagi kedua belah pihak karena melalui koordinasi ini dapat dibicarakan perihal mengenai :

a. problem,

yaitu berbagai permasalahan yang dihadapi sekolah, khususnya masalah yang dihadapi anak dalam proses pendidikan di sekolah, sehingga orang tuanya mengerti apa dan bagaimana mereka harus berperan dalam membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas anaknya masing-masing.

Dalam konteks PSG, problem ini dapat diartikan permasalahan yang dihadapi oleh pihak DU/DI kaitannya dengan siswa yang melaksanakan praktek kerja industri (prakerin) pada DU/DI yang bersangkutan.

b. program

program apa yang akan dilakukan sekolah dalam satu semester yang akan datang atau satu tahun yang akan datang, perlu diberitahukan kepada masyarakat/orang tua murid agar mereka mendapat kejelasan kemana arah pengembangan sekolah ini di masa yang akan datang.

Dalam konteks PSG, program dapat diartikan sebagai ketrampilan apa saja yang akan, telah dan diberikan oleh DU/DI kepada siswa prakerin. Siswa diterjunkan ke DU/DI dengan tujuan agar siswa dapat memperoleh kemampuan profesional dengan standar dunia kerja. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemampuan tersebut siswa dididik dengan cara dan budaya DU/DI tempat siswa melaksanakan prakerin sehingga mengenai materi maupun ketrampilan yang akan diberikan kepada siswa diserahkan kepada pihak DU/DI tempat siswa melakukan prakerin,

c. progress

Progress merupakan kemajuan yang diperoleh anak dan prestasi sekolah, khususnya prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Secara khusus progress anak dalam satu semester atau satu tahun ajaran.

Dalam konteks PSG, progress dapat diartikan sebagai kemajuan atau pencapaian ketrampilan siswa di DU/DI tempat siswa prakerin. Sejauh mana siswa mampu menguasai ketrampilan yang diajarkan senantiasa dicatat dan dilaporkan dalam temu koordinasi antara pihak SMK dengan DU/DI.

3. coverage

Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek/ faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat yang dalam hal ini adaah DU/DI. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya lengkap, akurat dan *up to date*.

4. simplicity

Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dalam konteks ini adalah DU/DI dilakukan oleh pihak pemberi informasi (SMK) secara baik yaitu dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan, sesuai dengan kondisi dan karakteristik DU/DI. Prinsip kesederhanaan ini juga mengandung makna bahwa:

- a. informasi yang disajikan dinyatakan dengan kata-kata yang penuh persahabatan dan mudah dimengerti. Penggunaan istilah sedapat mungkin disesuaikan dengan tingkat pemahaman DU/DI.
- b. Penggunaan kata-kata jelas, disukai masyarakat atau akrab bagi pendengar.
- c. Informasi yang disajikan menggunakan pendekatan budaya DU/DI setempat.

5. constructiveness

Program hubungan sekolah (SMK) dengan masyarakat hendaknya memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat (DU/DI). Dengan demikian masyarakat akan memberikan

respon hal-hal positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah (*problem* dan *constraint*) yang dihadapi sekolah. Prinsip ini juga berarti dalam penyajian informasi hendaknya obyektif tanpa emosi dan rekayasa tertentu. Di samping itu informasi yang disajikan harus dapat membangun kemauan dan merangsang untuk berpikir bagi penerima informasi.

Penjelasan yang konstruktif akan menarik bagi masyarakat dan akan diterima oleh masyarakat tanpa prasangka tertentu, hal ini akan mengarahkan mereka untuk berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan sekolah,

6. adaptability

Program hubungan sekolah (SMK) dengan masyarakat (DU/DI) hendaknya disesuaikan dengan keadaan lingkungan DU/DI, terutama penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya (*culture*) dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Direktorat Tenaga Kependidikan mengemukakan bahwa hubungan sekolah yang dalam hal ini SMK dengan masyarakat yang dalam hal ini adalah DU/DI dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Menganalisis masyarakat

Kegiatan pertama dalam pelaksanaan manajemen hubungan masyarakat adalah menganalisis masyarakat yang berkaitan dengan sasaran masyarakat, kondisi, karakter, kebutuhan dan keinginan masyarakat akan pendidikan, problem yang dihadapi masyarakat serta aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya seperti kebiasaan, sikap, religius (fanatisme beragama) dan sebagainya. Hal ini sangat penting, karena pemahaman yang salah tentang kondisi masyarakat, akan menyebabkan program-program yang disusun dan dikembangkan oleh sekolah dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk pendidikan akan kurang tepat. berkembang akibat kebijakan pendidikan oleh pejabat pendidikan termasuk kebijakan yang diambil oleh sekolah seperti tentang BOS, uang sumbangan penerimaan siswa baru dan lain-lain.

Menganalisis masyarakat dalam konteks pembicaraan ini dapat dilakukan dengan mencari tahu informasi mengenai DU/DI yang dapat dijangkau oleh SMK yang bersangkutan. Penelusuran informasi ini biasanya dilakukan setelah adanya kegiatan sosialisasi mengenai program PSG yang diadakan oleh Dinas Pendidikan setempat yang juga mengundang berbagai macam DU/DI untuk diperkenalkan kepada SMK wilayah setempat. Penelusuran informasi dapat dilakukan melalui Dinas terkait (Dinas Pendidikan atau Dinas Tenaga Kerja).

2. Mengadakan komunikasi

Tahap kedua dalam mengadakan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah mengadakan komunikasi dengan masyarakat sasaran. Dalam konteks ini, setelah SMK memperoleh berbagai informasi yang diperlukan mengenai DU/DI, pihak SMK kemudian melakukan komunikasi dengan DU/DI yang sekiranya akan dibidik untuk diajak bekerjasama dalam pelaksanaan PSG. Komunikasi ini biasanya dilakukan secara langsung melalui suatu pertemuan.

3. Melibatkan masyarakat

Melibatkan masyarakat bukan hanya sekedar menyampaikan pesan tapi lebih dari itu yaitu menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan dan program sekolah. Dalam konteks humas pendidikan dalam PSG, pelibatan dilakukan jika sudah terjadi kontrak kerjasama antara SMK dengan DU/DI yang ditandai dengan ditandatanganinya MoU. Jika MoU sudah ditandatangani artinya baik itu SMK maupun DU/DI sudah memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang sudah disepakati bersama. Adanya kontrak tersebut dapat menjadi pedoman bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan tugas masing-masing. Dengan adanya kontrak kerja dengan DU/DI, maka pelibatan DU/DI dalam PSG sudah dilakukan.

Langkah-langkah di atas secara konkret digambarkan sebagai langkah persiapan untuk menjalin kerjasama antara SMK dengan DU/DI yang oleh Agung Raharjo (1997:25-27) dijabarkan sebagai berikut :

1. Sekolah mengkaji berbagai industri dan lembaga yang potensial yang ada di sekitar wilayahnya yang antara lain meliputi :
 - a. Jenis dunia usaha,
 - b. Aktivitas proses produksi yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau lembaga tersebut,
 - c. Kualifikasi tenaga kerja yang meliputi jabatan-jabatan tenaga kerja yang ada, tugas-tugas yang dikerjakan, serta keahlian / ketrampilan apa saja yang mungkin diperoleh di perusahaan tersebut,
 - d. Fasilitas praktek atau fasilitas produksi yang tersedia,
 - e. Daya tampung atau kemungkinan jumlah siswa yang bisa diterima untuk pelatihan,
 - f. Kualifikasi lembaga, apakah tergolong perusahaan besar, menengah, atau kecil.
2. Melakukan pengkajian terhadap semua ketrampilan yang sesuai dan dapat diperoleh di setiap industri. Dalam hal ini, pada bagian atau divisi dan sub bagian di industri apa sajakah ketrampilan yang sesuai dapat diperoleh peserta PSG untuk masing-masing program studi,

3. Sekolah melalui majelis sekolah atau komite sekolah merintis kerjasama dengan industri atau perusahaan yang sesuai dengan standar keahlian atau ketrampilan tiap-tiap program studi. Dalam hal ini sekolah membuat kerja sama dengan DU/DI secara tertulis tentang pelaksanaan PSG atau biasa disebut dengan Memorandum of Understanding (MoU) yang memuat :
 - a. Hak dan kewajiban DU/DI dalam melaksanakan PSG
 - b. Hak dan kewajiban sekolah dalam melaksanakan PSG
 - c. Penyusunan atau sinkronisasi kurikulum PSG atau bahan ajar
 - d. Mekanisme dan prosedur pelaksanaan PSG
 - e. Pembiayaan
 - f. Pengawasan dan pengendalian mutu PSG
 - g. Uji kompetensi
 - h. Seleksi siswa
 - i. Pemasaran tamatan
 - j. Hal-hal lain yang dianggap penting.

Untuk butir c, e, f, g, h, i sekolah hendaknya melibatkan pihak-pihak terkait seperti : Kadinda, Asosiasi profesi, Kementerian TenagaKerja, Dinas Pendidikan, dan lain-lain.

Agar informasi tentang sekolah disampaikan dengan baik dan dapat dipahami oleh komunitas sekolah (guru, karyawan dan siswa), terutama masyarakat atau lembaga lain kaitannya dengan pelaksanaan PSG maka diperlukan teknik komunikasi yang baik. Dalam hal ini, proses komunikasi merupakan proses menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari orang ke orang atau dari kelompok ke kelompok yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang-orang dan kelompok-kelompok di dalam suatu organisasi sekolah (intern) dan di luar sekolah (ekstern). Dengan komunikasi, komunitas sekolah dan lembaga di luar sekolah akan memahami dan menerima pesan, ide atau informasi yang telah disampaikan.

Menurut John L. Beckley ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar komunikasi menjadi berhasil yaitu :

1. Practice self control

Sebelum memberikan informasi kepada pihak lain yang dalam hal ini adalah DU/DI, pastikan bahwa informasi, petunjuk atau saran yang diberikan telah juga dilakukan oleh pihak SMK. Misalnya SMK meminta pihak DU/DI untuk lebih memperhatikan SMK. Saat mengajukan tawaran kerjasama, SMK tidak begitu saja meminta kepada DU/DI, namun SMK juga harus memperhatikan kepentingan DU/DI, seperti misalnya menawarkan kelebihan SMK yang bisa menjadi nilai tambah bagi DU/DI jika nanti kedua belah pihak bekerjasama. Jadi, SMK tidak hanya menuntut untuk diperhatikan,

tetapi SMK juga harus memperhatikan kepentingan DU/DI sehingga kerjasama yang dilakukan bersifat saling menguntungkan (mutualisme).

2. Appraside and where deserve

Sikap menghargai lawan bicara menjadi salah satu kunci pokok dalam berhasilnya komunikasi. Siapapun yang ditunjuk oleh SMK untuk menjadi juru bicara dalam menjalin hubungan kerjasama dengan DU/DI baik itu kepala sekolah maupun bukan harus bisa menghargai lawan bicara yang dalam hal ini adalah DU/DI. Menghargai tidak harus dengan menggunakan materi, tetapi dalam hal ini penghargaan lebih kepada sikap saling pengertian dan menerima lawan bicara. Anggukan kepala, mengatakan "baik", dan juga tidak memalingkan muka sudah merupakan sikap yang menunjukkan perilaku menghargai terhadap lawan bicara.

3. Critisize tacfully

Suatu hubungan kerjasama tidak semuanya dapat berjalan dengan mulus sesuai dengan harapan. Jika permasalahan terjadi, sampaikan masukan, kritikan, atau saran kepada pihak mitra kerja (DU/DI) secara bijaksana tanpa menyinggung perasaan. Mengingatkan secara halus terhadap persetujuan yang sudah disepakati bersama sebelumnya adalah hal yang tepat jika ketidaksepahaman mulai terjadi.

4. Always listen

Mencoba menjadi pendengar dalam kegiatan komunikasi adalah hal yang perlu dilakukan. Hal ini berarti kita lebih peka terhadap keinginan dari lawan bicara kita. Kita juga dituntut untuk tidak menjadi dominan dalam pembicaraan sehingga kedua belah pihak dapat saling berimbang menyampaikan gagasannya.

5. Stress reward

Memberikan penghargaan terhadap lawan bicara merupakan suatu hal yang tidak boleh dilupakan. Berikan penghargaan kepada lawan bicara jika memang hal tersebut perlu diberikan. Misalnya dengan mimik muka apresiasif, atau dengan ucapan terimakasih.

6. Considere the pesons interest

Etika dalam berkomunikasi sangat penting dipedomani. Setiap akan memulai suatu komunikasi, mulailah dengan hal-hal yang dapat membangkitkan semangat lawan bicara misalnya dengan sedikit menyentuh minat dan hobinya sehingga perbincangan yang formal dapat berjalan santai dan tidak kaku. Ketika perbincangan berjalan secara santai, maka kedua belah pihak dapat menyampaikan aspirasi dan membicarakan persoalan secara terbuka. Dengan adanya kondisi yang terbuka tanpa adanya tekanan, solusi terhadap persoalan akan lebih mudah diperoleh.

Dengan demikian, aktivitas humas harus dipertahankan supaya tetap berada pada tataran yang dapat mendukung upaya untuk menjalin hubungan kerjasama dengan DU/DI.

F. Penutup

Penyelenggaraan pendidikan di SMK yang akrab disebut dengan Pendidikan Sistem Ganda merupakan program pendidikan yang memadukan antara pendidikan di sekolah dengan praktek di dunia kerja. Oleh karena itu, pendidikan di SMK tidak pernah bisa terlepas dari peran Dunia Usaha/ Dunia Industri (DU/DI).

Keberadaan DU/DI bagi pendidikan di SMK merupakan hal penting. Terkait dengan perannya dalam PSG, selain sebagai *aktivis* DU/DI juga berperan sebagai *edukator*. Peran DU/DI dalam PSG menunjukkan adanya hubungan kemitraan antara SMK dengan DU/DI. Hubungan kemitraan ini tentu tidak terjadi begitu saja tanpa melalui suatu proses. Bukan hal yang mudah bagi SMK untuk bisa memperoleh mitra kerja. Modal penting bagi SMK agar dapat menjalin hubungan kerjasama dengan DU/DI adalah adanya citra sekolah yang baik, yang dapat menarik minat dari DU/DI untuk bersedia bekerjasama. Selain itu, diperlukan juga ketrampilan dari pihak SMK untuk bisa “menjual” (menunjukkan nilai jual) sekolahnya dan meyakinkan pihak DU/DI sehingga DU/DI bersedia bekerjasama menjadi mitra kerja SMK.

Hal-hal di atas erat kaitannya dengan aktivitas humas. Humas yang berhasil akan memberikan kontribusi yang besar terhadap perintisan dan pemeliharaan kerjasama antara SMK dengan DU/DI. Dalam rangkaian kegiatan humas, arus informasi sangat penting baik itu informasi masuk maupun informasi yang keluar. Sasaran informasi dapat berupa masyarakat intern maupun ekstern. Yang pasti, dalam kegiatan humas, kegiatan penyampaian informasi pasti terjadi. Informasi ini dapat sampai kepada tujuannya melalui komunikasi sehingga, keberhasilan komunikasi ini memegang peranan penting bagi keberhasilan kegiatan humas.

Daftar Pustaka

- Agung Raharjo. (1997). *Studi tentang Pendidikan Sistem Ganda di SMKN 2 Wonosari*. Laporan Penelitian. UNY.
- Ahmad Suriansyah, Amka. (2002). *Panduan Manajemen Berbasis Sekolah di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin : Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.
- B.N. Marbun.(2003). *Kamus Manajemen*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

- Depdikbud. (1994). *Konsep Sistem Ganda pada Pendidikan Menengah Kejuruan di Indonesia*. Jakarta : Depdikbud
- Direktorat tenaga kependidikan. (2007). *Modul pendidikan dan Pelatihan Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta :Depdiknas
- Rumanti, Maria Assumpta. (2001). *Dasar-dasarPublic Relation Teori dan Praktik*. Jakarta : Dikti Depdiknas.
- Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean. (2004). *Kurikulum SMKN 2 Godean*. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman : SMKN 2 Godean
- Slamet P.H. (1994). *Persiapan Kerja dalam Program Pendidikan Menengah Kejuruan, Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia*. Bandung : IKIP Bandung
- Wardiman Djojonegoro. (1994). *Kebijakan dan Program Pengembangan Pendidikan Kejuruan di Indonesia. Makalah disajikan pada seminar Forum Komunikas Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan se Indonesia di IKIP Surabaya, 23 November 1994*
- Zulkarnain Nasution. (2006). *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan*. Malang : UMM press